

DARI KEBUN ANGGUR NABOT KE PERAMPASAN ASET RAKYAT: TAFSIR KRITIS 1 RAJA-RAJA 21 TERHADAP KETIDAKADILAN KORPORASI

Beatus Celvinsantius Riwu Rau¹, Mario Laurensius C. B. Teluma², Aloysius Mischelle Seling³
celvinorau09@gmail.com¹, reinteluma385@gmail.com², miselseling@gmail.com³

IFTK Ledalero

Abstract

This article explores 1 Kings 21 through a critical hermeneutical lens to uncover the corporate injustice embedded in contemporary socio-economic systems. By analyzing the narrative of Naboth's vineyard being seized by Ahab and Jezebel, the study highlights the collusion of legal legitimacy, religious symbols, and political power to oppress the marginalized. A contextual hermeneutic approach is employed to draw parallels between the biblical narrative and modern-day land grabbing, legal manipulation, and corporate extractivism under neoliberal frameworks. The study reveals that the story of Naboth contains strong prophetic and ethical dimensions relevant to today's faith communities. It emphasizes that legality does not equate to justice, and prophetic voices are still necessary to challenge oppressive systems. This article calls the Church to engage in prophetic action against economic dominance that dehumanizes both people and creation. Elevating the voice of the biblical text as a counter-narrative to dominant ideologies, the article contributes to a transformative and contextual public theology.

Keywords: 1 Kings 21, Critical Interpretation, Corporatism, Land Grabbing, Prophetic Theology, Social Justice.

PENDAHULUAN

Korporasi telah menjadi entitas dominan dalam mengatur aliran modal, sumber daya, dan bahkan arah kebijakan publik. Secara yuridis, korporasi didefinisikan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari individu pemiliknya, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan kontrak, memiliki asset, serta menuntut atau dituntut dipengadilan. Akar paling dalam dari dominasi korporasi terletak pada dua prinsip hukum modern yang secara ironis dianggap sebagai fondasi stabilitas ekonomi, namun justru melahirkan asimetri tanggung jawab moral yakni limited liability (tanggung jawab terbatas pemilik) dan corporate personhood (status kepribadian hukum terbatas perusahaan).

Prinsip tanggung jawab terbatas berarti bahwa pemilik atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh korporasi melebihi jumlah investasi mereka. Sementara itu, status kepribadian hukum memungkinkan korporasi untuk memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia, tanpa memiliki kesadaran moral atau tanggung jawab etis sebagaimana subyek manusia. Kedua entitas ini menciptakan entitas yang secara hukum hidup, tetapi secara etis tak bernyawa. Sebuah manusia artifisial yang dapat beroperasi melintasi batas negara, mengekstraksi kekayaan, tetapi kebal dari tuntutan kemanusiaan. Teolog Walter Wink menyebut struktur semacam ini sebagai kekuatan tak kasat mata yang telah jatuh (The Fallen Powers), yakni suatu sistem dunia yang memerlukan penebusan karena telah kehilangan orientasi pada kebaikan bersama. Maka struktur hukum ini bukan hanya persoalan teknis melainkan juga suatu persoalan teologis yang memerlukan pembacaan profetis.

Dalam lanskap ekonomi yang dikuasai oleh “powers” yang telah jatuh, yakni sistem kuasa sosial, hukum, dan ekonomi yang kehilangan arah ilahinya, kisah 1 Raja-Raja 21 tampil narasi profetik yang membongkar mekanisme ketidakadilan struktural sejak zaman dahulu. Perjumpaan antara Nabot, seorang pemilik kebun anggur yang mewakili rakyat kecil, dan Raja Ahab yang didukung oleh struktur kekuasaan kerajaan dan manipulator hukum (Izabel), bukanlah sekedar konflik pribadi, melainkan drama arketipal tentang bagaimana kepemilikan atas tanah, hak warisan, dan integritas moral bisa dirusak oleh keinginan kuasa yang dibalut legalitas. Dalam kajiannya, Jeremy Schipper menekankan bahwa narasi ini mencerminkan praktik kekuasaan yang menggunakan hukum untuk melayani hasrat elite dan membungkam suara rakyat. Sementara itu, Marvin L. Chaney, membaca kisah Nabot sebagai prototipa dari praktek perampasan tanah dalam sistem patrinase kerajaan, yang terus berulang dalam bentuk-bentuk imperialisme ekonomi modern.

Tanah bukan hanya obyek ekonomi dalam narasi ini, ia adalah simbol identitas perjanjian, dan berkelanjutan komunitas. Ketika Nabot menolak menjual tanahnya demi loyalitas terhadap kaum nenek moyang (bdk. Im 25: 23), ia menegaskan nilai-nilai terhadap struktur dunia yang korup. Namun justru karena itu, ia menjadi korban dari sistem yang tidak lagi mengenal keadilan, melainkan hanya tunduk pada kepentingan penguasa. Kisah ini membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap realitas kontemporer, ketika korporasi modern, serupa Ahab dan Izabel, menggunakan legitimasi hukum untuk mengamankan ekspansi kekuasaan ekonomi dengan mengorbankan suara dan hidup komunitas lokal.

Kajian ini bertujuan untuk membaca ulang kisah Nabot dalam 1 Raja-Raja 21 sebagai cermin profetik atas prakti-praktik perampasan yang di lembagakan, terutama dalam konteks kontemporer Indonesia di mana korporasi besar sering kali bersekongkol dengan kekuasaan politik untuk mengambil alih aset dan ruang hidup rakyat. Melalui pendekatan tafsir kritis, studi ini hendak memperlihatkan bagaimana struktur dominasi dan kekerasan sistemik yang tampak dalam kisah tersebut memiliki korespondensi erat dengan mekanisme korporasi kapitalistik masa kini, khususnya yang menysasar lahan, hutan adat, atau wilayah masyarakat adat dan petani kecil. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hermeneutika pembebasan yang tidak hanya menafsirkan teks secara historis, tetapi menjadikannya sebagai instrumen untuk menyuarakan keadilan sosial. Dengan meminjam lensa ini, kisah Nabot bukan hanya menjadi ingatan tragedi masa lampau, melainkan narasi tandingan terhadap wacana hukum dan kepemilikan yang telah di kooptasi kekuasaan korporat. Penelitian ini ingin menegaskan bahwa suara profetik Alkitab tetap relevan sebagai kritik atas ketimpangan ekonomi sebagai seruan pertobatan struktural.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir kritis yakni metode hermeneutika yang tidak hanya menggali makna historis-teologis dari teks Alkitab, tetapi juga membacanya sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik kontemporer. Tafsir kritis mengedepankan keberpihakan kepada mereka yang tertindas dan mengekspos struktur kekuasaan yang menindas dalam narasi kitab suci maupun realitas sosial saat ini.

Secara metodologis, penelitian ini juga mengacu pada kerangka hermeneutik kontekstual, sebagaimana dikembangkan oleh Gerald O. West, yaitu membaca Alkitab bersama komunitas basis dengan menghadirkan dialog antara dunia teks dan dunia pembaca. Pendekatan ini menjadikan teks bukan sekedar dokumen keagamaan, tetapi sebagai cermin profetik terhadap ketidakadilan struktural yang masih berlangsung di dunia modern, termasuk dalam ranah korporasi. Selain itu, pendekatan intertekstual dan sosiologis

digunakan untuk menelaah bagaimana kisah perampasan kebun anggur Nabot oleh kekuasaan mencerminkan logika eksklusif, manipulasi hukum, dan kooptasi kekuasaan demi kepentingan elite. Hal ini dipaparkan dengan praktik-praktik korporasi modern yang sering kali menyingkirkan rakyat kecil dari hak tanah dan sumber daya publik.

Tulisan ini disusun dalam enam bagian utama yakni pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap teks Alkitab dalam menghadapi realitas ketidakadilan struktural. Kedua, metodologi dan sistematika penulisan yang menjelaskan pendekatan tafsir kritis yang digunakan, termasuk metodologi hermeneutik kontekstual dan pembacaan sosiologis. Ketiga, konteks teks dan realitas sosial: 1 Raja-Raja 21 dan dunia korporasi modern yang menggambarkan latar historis-teologis teks serta paralelnya dengan situasi korporatis dan perampasan aset publik masa kini. Keempat, tafsir kritis terhadap 1 Raja-Raja 21 yang menyuguhkan analisis naratif terhadap tokoh-tokoh dalam teks (Nabot, Ahab, Izebel) dan dinamika kekuasaan yang terlibat. Kelima, implikasi etis dan teologis; kritik Alkitab terhadap korporatisme yang mengaitkan hasil tafsir dengan dengan isu-isu kontemporer, termasuk refleksi profetis dan etis bagi komunitas iman. Keenam, sebagai kesimpulan yang menawarkan keterlibatan etis berbasis iman dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi.

PEMBAHASAN

Konteks Teks dan Realitas Sosial: 1 Raja-Raja 21 dan Dunia Korporasi Modern

Kisah Nabot dalam 1 Raja-Raja 21 merupakan narasi yang kompleks tentang perjumpaan iman, tanah, dan kekuasaan. Tanah yang ditolak untuk dijual oleh Nabot bukanlah sekedar properti, melainkan representasi dari identitas, warisan luhur, dan komitmen perjuangan Israel dengan YHWH (bdk. Im 25:23). Dalam konteks ini keputusan Nabot bukan tindakan melawan otoritas raja semata, tetapi perwujudan iman yang menolak logika komodifikasi atas sesuatu yang sakral. Penolakan tersebut menjadi bentuk resistensi iman terhadap sistem kekuasaan yang ingin mereduksi nilai tanah menjadi semata-mata obyek kapital.

Dari sisi sosial, teks ini mencerminkan realitas struktural yang timpang; ketika otoritas publik (Raja) bekerja sama dengan institusi hukum dan simbol agama untuk melegitimasi penindasan. Izebel tidak membunuh dengan pedang, melainkan dengan surat resmi dan sistem dan sistem pengadilan yang dimanipulasi. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur legal dapat dimanfaatkan oleh elite untuk mengamankan kepentingan mereka di atas penderitaan rakyat kecil. L. Daniel Hawk (2023) menegaskan bahwa teks “perampasan tanah dalam teks Perjanjian Lama sering beroperasi melalui mekanisme sosial dan hukum yang tampak sah, tetapi merusak keadilan komunal”.

Kondisi ini memiliki paralel yang kuat dalam dunia modern. Dalam berbagai kasus, perusahaan multinasional dan aktor negara bekerja sama dalam proses ekstraktivisme dan privatisasi sumber daya yang merugikan masyarakat lokal. Fenomena ini sering dibungkus dalam retorika pembangunan dan investasi, tetapi dalam praktiknya memunculkan pengusiran, pencemaran lingkungan, dan marginalisasi budaya. Natalia Gomez dan Johan Rockstrom (2022) mengungkapkan bagaimana konsentrasi lahan global saat mencerminkan pola kolonial baru di mana “korporasi dan negara menggunakan alat legal untuk mengambil alih lahan produktif dari komunitas adat dengan dalih efisiensi.”

Kisah Raja-Raja 21 secara profetis mengajak pembaca untuk menelaah ulang hubungan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan kritik terhadap sistem politik ekonomi masa kini. Nabot menjadi lambang perlawanan iman

terhadap 'korporatisme rohani', yakni penyatuan kekuasaan politis, legal dan ekonomi yang merusak martabat manusia. Dalam konteks ini, tindakan Elia sebagai nabi adalah panggilan bagi komunitas beriman untuk tidak bersikap netral terhadap struktur ketidakadilan. Gereja dan komunitas iman dipanggil untuk menjadi suara profetik guna melawan kekuatan yang kasat hukum tapi tak adil.

Tafsir Kritis Atas Kitab 1 Raja-Raja 21: Dinamika Kekuasaan dan Perampasan

Perikop 1 Raja-Raja 21 menawarkan narasi klasik mengenai penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan perampasan tanah oleh elite politik yang korup. Ini bukan sekadar cerita moral, melainkan sebuah potret struktural ketidakadilan yang bersifat sistemik dan karenanya amat relevan dengan dinamika korporatis dan neoliberalisme masa kini.

Secara struktural, kisah ini dimulai dari Ahab untuk memiliki kebun anggur Nabot yang berbatasan dengan istananya. Ahab menawarkan kompensasi yang adil menurut logika ekonomi dengan berkata, "Berilah kepadaku kebun anggurmumu supaya menjadi kebun sayur bagiku; aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya atau, jika engkau lebih suka, aku akan memberikan uang senilai itu." (1Raja 21:2). Namun Nabot menolak dan menyatakan "Kiranya Tuhan menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." (1Raj, 21:3). Dalam bahasa Ibrani, kata Nahalah secara teologis tidak hanya merujuk pada sebidang tanah, tetapi pada hak suci dan identitas kolektif yang diwariskan oleh Tuhan kepada Bangsa Israel, dengan kata lain, penolakan Nabot bukan soal harga, tetapi iman dan warisan.

Respon Ahab terhadap penolakan ini menandakan sikap monarki yang terjebak dalam hasrat eksploitatif yang tidak mengenal batas kepemilikan. Ketika Izebel turun tangan, ia menyusun skenario jahat dengan memanipulasi struktur keagamaan dan hukum "Maklumkan puasa dan tempatkan Nabot di tempat terhormat. Suruh dua orang dursila duduk di depannya dan menuduh dia dengan mengatakan; Engkau telah mengutuki Allah dan Raja." (1Raj 21; 9-10). Dalam ayat ini tampak bagaimana institusi keagamaan digunakan sebagai alat represi kekuasaan-suatu ironi yang juga tercermin dalam penggunaan bahasa agama oleh rezim neoliberal yang mengeksploitasi rakyat demi akumulasi kapital.

Para penafsir kontemporer melihat kisah ini sebagai contoh kekerasan struktural. Walter Brueggemann menilai bahwa Ahab bukan hanya figur raja jahat, tetapi lambang kekuasaan imperialis yang membungkam suara subaltern melalui kolusi politik-hukum-agama. Ia menyebut ini sebagai konsolidasi kekuasaan yang menghilangkan ruang etis bagi suara rakyat. Dalam terang ini, Ahab dan Izebel mewakili rezim predatoris yang ditopang oleh legitimasi formal, tetapi tidak adil.

Dalam konteks tafsir kritis, tindakan Elia sebagai nabi Tuhan sangat signifikan. Setelah peristiwa pembunuhan Nabot, Elia datang untuk menegur Ahab secara langsung, "tidakkah engkau membunuh dan merampas juga?" (1Raj 21: 19). Di sini, Elia bertindak sebagai representasi prosesi yang menggugat relasi kekuasaan. Seperti dinyatakan oleh Hans Walter Wolff, peran nabi dalam Israel kuno adalah menjadi pengacra etis umat dalam menghadapi kekuasaan hegemonik.

J. David Pleins menekankan bahwa kisah ini, memiliki paralel kuat dengan perampasan tanah petani di era modern. Ia menulis bahwa "kisah Nabot adalah bentuk awal literatur resistensi agraria dalam Alkitab." Dalam analisisnya, Pleins juga menyoroti bahwa Ahab dan Izebel bukan hanya individu jahat, tetapi simbol dari sistem ekonomi yang menyatukan kekuasaan politik dan akses tanah demi akumulasi kapital.

Paralel lebih lanjut dapat dilihat dalam dunia korporasi modern, di mana corporate land grabbing telah menjadi praktik global. Riset oleh Lorenzo Cotula dari International

Institute for Environmental and Development mencatat bagaimana korporasi multinasional membeli atau merebut tanah rakyat di Afrika dan Asia untuk kepentingan pertanian industri, sering kali dengan dalih pembangunan dan kemajuan ekonomi. Ini memperjelas bahwa ketidakadilan yang dialami Nabot tidaklah jauh dari realitas kini, di mana hukum dan negara kerap menjadi alat penjamin legalitas eksploitasi.

Selain itu, analisis Sung Uk Lim menunjukkan bahwa kisah ini mencerminkan sebuah kritik terhadap ekonomi eksternal yang merusak struktur internal umat. Ia menegaskan bahwa teks ini mengandung etos resistensi terhadap konsentrasi kekayaan dan kuasa yang mengabaikan integritas komunitas.

Lebih jauh lagi, penggunaan puasa dalam rencana kejahatan Izebel memberi isyarat bahwa ritual keagamaan bisa saja dimanipulasi oleh elite untuk membungkam kebenaran. Hal ini sangat kontekstual bila dikaitkan dengan praktik greenwashing atau spiritual banding dalam dunia bisnis modern, di mana korporasi menampilkan wajah etis tetapi secara struktural tetap eksploitasi.

Implikasi Etis dan Teologis: Kritik Alkitab Terhadap Korporatisme

Pembacaan kritis terhadap 1 Raja-Raja 21 mengantar pembaca pada sebuah kesimpulan mendasar yakni Alkitab tidak netral terhadap dinamika kekuasaan. Ia berpihak, bukan kepada sistem yang dominan, tetapi kepada mereka yang tertindas oleh kekuasaan tersebut. Dalam kisah Nabot, dapat dijumpai relasi antara tanah, kekuasaan, hukum dan iman—sebuah keempat yang juga menentukan dalam diskursus keadilan sosial masa kini. Maka, membaca teks ini tidak cukup sebagai cerita masa lampau, tetapi sebagai seruan teologis-etis terhadap struktur ekonomi politik yang menindas, termasuk dalam bentuk modernnya yaitu korporatisme global.

Korporasi modern, dalam banyak kasus, telah menjadi bentuk institusi kekuasaan yang tak terpilih, namun pengaruh luas terhadap kehidupan publik. Mulai dari penguasaan tanah, sumber daya, media hingga sistem legislasi adalah cakupan kekuasaan korporasi hari ini. Seperti Ahab yang memiliki otoritas kerajaan tetapi tidak memiliki batas etika atas kehendaknya, demikian pula korporasi hari ini sering bertindak seolah-olah memiliki legitimasi untuk mengakumulasi kekayaan atas nama efisiensi, sambil mengabaikan dimensi keadilan dan hak komunitas lokal.

Studi oleh Jeffers dan Chaves (2021) menggarisbawahi bahwa dalam konteks globalisasi ekonomi, korporasi bertindak sebagai agensi hegemonik tanpa akuntabilitas demokratis, dan sering kali menggunakan lembaga negara serta hukum untuk melegitimasi proyek-proyek ekstraktif. Ini sangat paralel dengan tindakan Izebel dalam kisah Nabot, yang tidak membunuh dengan pedang, tetapi dengan stempel raja dan sidang rakyat—mekanisme hukum yang tampaknya sah, tetapi sejatinya digunakan untuk merampas hak warga. Maka secara etis teks ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum tidak selalu identik dengan keadilan, dan komunitas beriman ditantang untuk mempertanyakan struktur legal yang menindas.

Implikasi teologisnya sangat kuat. Dalam teologi Perjanjian Lama, tanah bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan (Im 25:23). Dengan demikian, upaya menguasai tanah tanpa pertimbangan terhadap martabat manusia dan hukum Allah merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintah Ilahi. Konsep ini penting untuk menjadi dasar etika ekologi dan hak atas tanah dalam teologi kontekstual. Seperti dicatat oleh Norman Habel dalam teks dan realitas; ia bukan benda pasif, melainkan partisipan dalam relasi perjanjian antara Allah dan umat. Maka perampasan tanah bukan hanya ketidakadilan sosial, tetapi juga dosa ekologis dan spiritual.

Lebih jauh, tindakan Elia sebagai nabi menyingkapkan dimensi kenabian publik. Ia tidak hanya menegur secara personal, tetapi juga menubuatkan kehancuran atas struktur yang menindas. Dalam tradisi kenabian, teguran bukanlah sekadar kritik moral, tetapi suatu tindakan performatif yang menciptakan ruang bagi kebenaran untuk tampil. Seperti ditulis oleh Marion Grau (2020), kenabian dalam Alkitab adalah perlawanan simbolik terhadap sistem yang menjadikan hidup manusia sebagai objek eksploitasi—dan dalam konteks ini, sistem tersebut adalah pasar, modal, dan mesin kekuasaan. Karena itu, Gereja mesti melanjutkan suara kenabian tersebut. Ia tidak hanya berhenti pada pembincaraan kasih dan pengampunan, melainkan harus berani bersikap kritis terhadap sistem ekonomi politik yang merusak martabat manusia dan ciptaan. Dalam konteks Indonesia, misalnya proses advokasi kasus-kasus agraria dapat menjadi suatu peran aktif yang dapat diambil Gereja pula dengan membentuk suatu spiritualitas yang menyatukan iman dengan perjuangan hak hidup.

Eetika Kristen tidak dapat dikurung dalam individualisme moral. Kisah Nabot menuntut pembacaan yang membongkar sistem. Jika dalam kisah itu Elia berdiri melawan Ahab dan Izebel, maka dalam dunia ini, siapa yang berdiri melawan korporasi-korporasi rakus tersebut menjadi suatu pertanyaan teologis yang tak bisa dihindari oleh Gereja. Seperti dicatat oleh Michael Northcott dalam *A Political Theology of Climate Change*, “Gereja tidak bisa menjadi saksi Injil jika ia bungkam terhadap struktur yang merusak bumi dan menghancurkan kaum miskin”.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa dalam kisah Nabot dalam 1 Raja-Raja 21 tidak hanya berbicara tentang tragedi personal akibat kerasukan penguasa, tetapi merupakan potret struktural dari ketidakadilan sistemik yang dilembagakan melalui kekuasaan politik, legalitas palsu, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keimanan. Penolakan Nabot terhadap tawaran Raja Ahab adalah tindakan iman, bukan sekedar aksi kepemilikan. Sebaliknya, pembunuhan Nabot melalui manipulasi hukum dan simbol agama memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan dapat dikorbankan kepada ambisi dan akumulasi kekayaan sesuatu pola yang terus terulang dalam wajah korporatisme modern.

Pembacaan kontekstual terhadap teks ini membuka wawasan bahwa struktur ekonomi-politik masa kini, seperti yang diwujudkan dalam *land grabbing*, eksploitasi sumber daya, dan kriminalisasi rakyat kecil oleh entitas korporat, memiliki pola yang sama dengan narasi biblis tersebut. Dalam sistem di mana hukum dapat dibeli dan media dapat dikendalikan, yang tersisa hanyalah suara kenabian seperti Elia yang menggugat dan menubuatkan keadilan Allah.

Secara teologis, teks ini mengafirmasi prinsip bahwa tanah adalah milik Tuhan dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas bebas, apalagi oleh kekuatan yang merampas dengan legalitas semu. Dalam kerangka ini, teologi publik Kristen ditantang untuk bersikap netral dalam menghadapi ketimpangan struktural. Gereja dan komunitas iman dipanggil untuk menjadi saksi injil dengan menyuarakan keadilan, membela martabat, dan menolak pembiaran sistem yang meminggirkan mereka yang lemah. Implikasi etis dari kajian ini pun jelas yakni iman harus diwujudkan dalam keberpihakan yang konkret. Membaca teks Alkitab secara kritis bukan hanya membuka mata terhadap struktur penindasan, tetapi juga mendorong transformasi praksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakan, J. (2004). *The corporation: The pathological pursuit of profit and power*. New York: Free Press.
- Bakan, J. (2020). *The new corporation: How “good” corporations are bad for democracy*. Toronto: Allen Lane.
- Bottomley, S. (2007). *The constitutional corporation: Rethinking corporate governance*. London: Ashgate.
- Brueggemann, W. (2001). *The prophetic imagination* (2nd ed.). Minneapolis: Fortress Press.
- Chaney, M. L. (1997). Systemic violence and the vineyard of Naboth. In F. F. Segovia (Ed.), *Reading the Bible in the global village*. Atlanta: SBL Press.
- Cotula, L. (2013). *The great African land grab? Agricultural investments and the global food system*. London: Zed Books.
- Gómez, N., & Rockström, J. (2022). Land grabbing revisited: Power, justice, and food sovereignty in the 21st century. *Journal of Political Ecology*, 29, 145–167.
- Grau, M. (2020). *Prophetic witness and empire: Religion, politics, and decolonial futures*. Minneapolis: Fortress Press.
- Habel, N. C. (2020). *The earth story in the Psalms and the prophets*. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.
- Hansmann, H., & Kraakman, R. (2000). The essential role of organization law. *Yale Law Journal*, 110(3), 390–393.
- Hawk, L. D. (2023). *Resisting the powers: A theology of land and the Old Testament*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Jeffers, K., & Chaves, J. (2021). Corporate power and the erosion of democratic accountability. *Global Justice Journal*, 9(2), 149–151.
- Lim, S. U. (2022). Economics of injustice and prophetic protest: A socio-rhetorical reading of Kings 21. *Biblical Interpretation*, 30(2), 205–222.
- Northcott, M. (2018). *A political theology of climate change*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Pleins, J. D. (2009). Poverty and wealth in the Hebrew Bible: A literary perspective. *Interpretation*, 63(4), 379–389.
- Schipper, J. (2007). Legal manipulation and power in the Naboth vineyard narrative. *Journal of Biblical Literature*, 126(1), 43–56.
- Sugirtharajah, R. S. (2001). *The Bible and the Third World: Precolonial, colonial, and postcolonial encounters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sugirtharajah, R. S. (2003). *Postcolonial reconfigurations: An alternative way of reading the Bible and doing theology*. St. Louis: Chalice Press.
- West, G. O. (2016). *The stolen Bible: From tool of empire to African icon*. Leiden: Brill.
- Wink, W. (1998). *The powers that be: Theology for a new millennium*. New York: Doubleday.
- Wolff, H. W. (1973). *Amos the prophet*. Philadelphia: Fortress Press.